

BAB IV

KESIMPULAN

Pada bab ini penulis akan menyimpulkan pembahasan yang sudah terdapat di bab-bab sebelumnya dalam skripsi ini. Pada Bab 1 penulis menuliskan pertanyaan penelitian yang menjadi pokok bahasan di Bab 3, pertanyaan penelitian tersebut adalah **“Apa saja kepentingan dan bentuk-bentuk kerjasama anti teror antara Kepolisian Republik Indonesia dan Kepolisian Federal Australia pasca Bom Bali 1?”**. Fokus pembahasan pada skripsi ini adalah kerjasama yang dilakukan antara kedua institusi kepolisian dari Indonesia dan Australia dalam melawan tindak kejahatan transnasional Terorisme pasca Bom Bali 1. Pembatasan penelitian ini mengingat bahwa Indonesia dan Australia menemui ancaman yang sama dalam menjaga keamanan dan ketertiban kedua negaranya dari bahaya Terorisme, dan institusi Kepolisian merupakan instrumen utama dalam melawan Terorisme tersebut.

Sedangkan pada Bab 2 pembahasan berfokus kepada profil dan peranan dari kedua institusi kepolisian Indonesia dan Australia di negara masing-masing, ditambah dengan dasar hukum yang mendasari kerjasama antara kedua institusi kepolisian tersebut dalam melawan tindakan Terorisme.

Pada Bab 3 pembahasan mulai difokuskan untuk menjawab pertanyaan penelitian yang ada di dalam Bab 1, diawali dengan deskripsi dari Terorisme itu sendiri, deskripsi kejadian terorisme yang menimpa Bali pada tanggal 12 Oktober

2002 yang menjadi awal mula kerjasama anti teror antara Indonesia dan Australia lewat Polri dan AFP. Berdasarkan teori yang dikemukakan oleh Mathiew Deflem terkait dengan Kerjasama Internasional Kepolisian dimana deflem berpendapat bahwa untuk melakukan sebuah kerjasama antara dua institusi kepolisian perlu adanya otonomi dari pemerintah negara tempat Institusi kepolisian tersebut berasal dan juga didasari atas kepentingan yang sama dalam kerja sama tersebut, selanjutnya diperlukan adanya dasar dalam melakukan kerjasama, harus adanya sebuah pusat pertukaran informasi dan pelatihan, adanya pertemuan guna mendiskusikan poin-poin kerjasama. Melalui teori tersebut dapat dihubungkan dengan kasus dalam penelitian yang mana Polri dan AFP melakukan kerjasama didasari atas kepentingan yang sama yaitu sama-sama ingin mengamankan dan menertibkan wilayah Indonesia dan Australia dari ancaman terorisme dan hal tersebut dilakukan oleh Kepolisian karna Kepolisianlah yang memiliki Otonomi dalam tindakan melawan terorisme di wilayah negara Indonesia dan Australia.

Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Kepolisian Federal Australia melihat semenjak terjadinya kejahatan terorisme pada 12 Oktober 2002 di Bali yang memakan banyak korban Jiwa baik itu dari Indonesia maupun Australia maka kedua negara ini lewat institusi penegak hukumnya perlu untuk melakukan kerjasama demi menjaga keamanan dan ketertiban wilayah kedua negara. Dan dalam melakukan dan mewujudkan kepentingan tersebut kedua institusi kepolisian ini melakukan berbagai kegiatan kerjasama yang berlatar belakang dari kejahatan terorisme tersebut, mengenai bentuk-bentuk kerja sama yang dilakukan oleh kedua institusi kepolisian ini, bentuk kerjasama yang paling sering dilakukan

adalah lewat kegiatan pelatihan dan pertukaran informasi antara kedua institusi kepolisian yang diwujudkan dengan pembentukan pusat pertukaran informasi dan pusat pelatihan yaitu JCLEC dan TNCC di wilayah Indonesia, dengan dibangunnya pusat pelatihan dan pertukaran informasi tersebut akan mempermudah proses koordinasi antara AFP dan Polri dalam melakukan kegiatan kerjasama, hal ini sejalan dengan teori yang dikemukakan oleh Mathiew Deflem yang mana ia menyebutkan bahwa untuk memperlancar proses kerjasama antara institusi kepolisian dari kedua negara perlu diadakan sebuah pusat pertukaran informasi dan pusat kegiatan kerja sama antara kedua pihak yang bekerjasama. . Deflem juga mengatakan bahwa perlu diadakannya sebuah kelompok kerjasama yang dibentuk untuk memperlancar poin-poin kerja sama yang sudah disetujui sebelumnya, hal ini dibuktikan dengan diadakannya pertemuan antara Kepolisian Republik Indonesia dan Kepolisian Federal Australia yang dilakukan rutin setiap tahun yang bertempat secara bergantian di Australia maupun Indonesia yang bertujuan untuk menjaga hubungan baik dan membicarakan mengenai proses kerjasama yang dilakukan dan mendiskusikan apa saja hambatan dan rintangan yang mungkin akan dihadapi serta mempertimbangkan masalah-masalah baru yang mungkin akan muncul sehingga perlu dijadikan bahan dalam proses perjanjian kerjasama selanjutnya.

Deflem juga menyebutkan pentingnya pemisahan antara unsur politik negara dalam proses pelaksanaan kerjasama antara kedua institusi kepolisian, mengingat hubungan Indonesia dan Australia yang dapat dibilang sebagai hubungan yang pasang surut yang bisa di suatu saat hubungan kedua negara ini

baik namun disuatu saat kemudian hubungan kedua negara ini kembali memanas, maka perlu dipisahkannya unsur politik dan diberikannya otonomi penuh kepada Kepolisian untuk melakukan kerjasama dirasa sangatlah perlu. Hal ini terbukti disaat Indonesia dan Australia sedang dilanda masalah terkait penyadapan oleh Pemerintah Australia terhadap Pejabat Negara Indonesia pada tahun 2013 dianggap tidak terlalu berpengaruh kepada proses kerjasama antara Polri dan AFP hal ini dibuktikan dengan tetap diadakan pertemuan terkait perjanjian kerja sama Polri dan AFP pada tahun 2014.

Sampai saat ini Polri dan AFP masih rutin untuk melakukan pertemuan-pertemuan terkait dengan penyelesaian kasus kejahatan lintas negara, melalui Senior Officer Meeting yang dilakukan setiap tahun antara Indonesia dan Australia, kedua pihak selalu merapatkan dan mendiskusikan bagaimana kerja sama akan terus terjalin dan semakin berguna dalam proses pemerintahan guna mewujudkan segala tujuan dan kepentingan yang harus dicapai dalam proses kerja sama ini.

Sehingga dapat dilihat bahwa melalui penelitian ini penulis dapat menjawab pertanyaan penelitian yaitu **apa saja kepentingan dan bentuk – bentuk kerjasama anti teror antara Polri dan AFP pasca Bom Bali 1?**” kepentingan yang dapat penulis simpulkan adalah kedua negara lewat institusi kepolisiannya ingin menjaga kestabilan dan keamanan serta ketertiban kedua wilayah negara yang telah terganggu dan terancam semenjak terjadinya Bom Bali 1 yang memakan banyak korban dari kedua negara. Dan bentuk-bentuk kerjasama yang dilakukan antara Polri dan AFP meliputi kerjasama dalam pertukaran informasi dan pelatihan serta pengembangan kapasitas dari anggota-anggota

kepolisian Indonesia dan Australia yang diwujudkan dengan dibangunnya JCLEC dan TNCC sebagai pusat pelatihan dan pertukaran informasi dari kedua negara terkait kasus terorisme. Dari hasil penelitian dapat dilihat bahwa seiring berjalannya waktu Indonesia sudah mulai mampu dan dapat melawan kejahatan terorisme berdasarkan kekuatan Polri yang mana kekuatan tersebut hasil dari kerjasama yang dilakukan dengan AFP melalui program-program pelatihan yang dilakukan antara Polri dan AFP. Kegiatan pelatihan yang dilakukan di JCLEC terbukti berhasil karena semenjak pembentukan JCLEC lebih dari 10.000 personel Polri dan AFP telah melakukan pelatihan dan menjadi aktor-aktor utama dan memegang posisi strategis dalam memberantas kegiatan terorisme di institusi kepolisian baik itu Polri maupun AFP.

Serta pembentukan TNCC juga dianggap sebuah kerjasama yang sangat menguntungkan baik itu bagi AFP maupun Polri karena lewat TNCC ini lah kedua institusi kepolisian dapat berbagi informasi terkaitu kejahatan transnasional khususnya terorisme, segala informasi baik itu umum maupun intelejen ditukarkan lewat teknologi yang telah dibangun dan di aplikasikan lewat TNCC, TNCC juga merupakan markas dari Detasemen Khusus 88 yang merupakan struktur utama Polri dalam melawan kegiatan terorisme.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU :

- John W. Creswell (2009). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Method Approaches*. 3rd ed. Los Angeles: Sage..
- Sukawarsini Djelantik (2010). *Terorisme: Tinjauan Psiko-politis, Peran Media, Kemiskinan, dan Keamanan Nasional*, Jakarta :Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Stewart Firth (2011). *Australia in International Politics: An Introduction to Australian Foreign Policy*, 3rd Edition
- Schmid .A. (1983). *Political Terrorism: A Research Guide to Concepts, Theories, Data Bases and Literature*. New Brunswick: Transaction
- Frederic Lemieux (2013). "International Police Cooperation: Emerging Issues, Theory and Practice". Routledge.
- Kenneth N. Waltz, (1979). *Theory of International Politics*. Reading, Mass.: Addison-Wesley Pub.
- Holsti, K.J dan Juanda, Wawan. (1987). *Politik Internasional :Kerangka untuk Analisis*, Penerbit Bina Cipta.
- Handbook of International Relation
- Dr. M. Gaussyah, S.H., M.H., (2014). "Peranan dan Kedudukan POLRI dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia".
- Soejono Soekanto. (1982). *Sosiologi Suatu Pengantar* , C.V Rajawali. Jakarta.
- Soejono Soekanto (2002). *Faktor-faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT.Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2002
- Juliartha, Edward. (2009). *Model Implementasi Kebijakan Publik*. Jakarta: Trio Rimba Persada
- Peter A. Toma and Robert Gorman (1990). *International Relation : Understanding Global Issue*, Brooke/Cole Publishing Co.
- M. Wise, William, (2005). "Indonesia's War on Terror", USINDO, United States- Indonesia Society,
- Mulyana W. Kusumah (1986). *Perspektif Teori dan Kebijaksanaan Hukum*.

Drs. Soejono (1996). *Kerjasama Internasional Di Bidang Kepolisian*, Lemdikpol, National Central Bureau Indonesia Interpol, Jakarta.

Utrecht, E, (1960). *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*, FMPM Unpad, Bandung.

Polri (2010). *Vademikum*, Divisi Hubungan Internasional Polri.

Polri (2016). “Mengisi Republik”, PTIK, Jakarta.

Poerwadarminta, W.J.S, (1952) *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.

Momo Kelana (1994). *Hukum Kepolisian*, PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta.

Bagir Manan (1993). *Beberapa Masalah Hukum Tata Negara Indonesia*, Alumni, Bandung.

Moh Nazir (1998). *Metode Penelitian*. Jakarta.

JURNAL:

Mathieu Deflem. 2007. *"International Police Cooperation Against Terrorism: Interpol and Europol in Comparison."* in Understanding and Responding to Terrorism, edited by H. Durmaz, B. Sevinc, A.S. Yayla, and S. Ekici. Amsterdam: IOS Press.

Mathieu Deflem (2005). “The Encyclopedia of Criminology” edited by Richard A Wright and J. Mitchell Miller. New York: Routledge, 2005.

Ikrar Nusa Bakti (1996), “Kilas Balik Hubungan Indonesia-Australia dan Prospeknya di Masa Akan Datang” dalam Profil Indonesia . Jurnal Tahunan CIDES No.2/1996

David Connery., Natalie Sambhi and Michael McKenzie (2014). *“A return on investment : The future of police cooperation between Australia and Indonesia”*, ASPI Special Report.

Kumar Ramakhrisna (2005). *The Jurnal Of Conflict Studies “The Southeast Asian Approach” to Counter-Terrorism: Learning from Indonesia and Malaysia.*

Chalk, Peter, Angel Rabasa, William Rosenau, and Leanne Piggot. A Net Assessment : “The Evolving Terrorist Threat to Southeast Asia”.

SEARCCT. Selection of Article Volume 1. Kuala Lumpur. 2013

PUBLIKASI PEMERINTAH:

Montevideo Convention on the Rights and Duties of States

Buku Putih Pertahanan Indonesia (2015). Kementerian Pertahanan Indonesia, Kerja sama Internasional di Bidang Pertahanan.

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. Pol : 7 Tahun 2006 Tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Nota Kesepahaman Antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Australia Tentang Penanggulangan Kejahatan Lintas Negara dan Pengembangan Kerjasama Kepolisian.

Nota Kesepahaman Antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Australia Tentang Penanggulangan Kejahatan Lintas Negara dan Pengembangan Kerjasama Kepolisian tahun 2005.

Perjanjian Antara Republik Indonesia dan Australia Tentang Kerangka Kerjasama Keamanan.

Perjanjian Lombok, Perjanjian Pertahanan dan Keamanan Indonesia-Australia, 2006.

Nota Kesepahaman Antara Mengenai Kerjasama Antara Kepolisian Republik Indonesia dan Kepolisian Federal Australia Tahun 1997.

Laporan Tahunan Kepolisian Federal Australia Tahun 2001-2002

Laporan Tahunan Kepolisian Federal Australia Tahun 2003-2004

Laporan Tahunan JCLEC Tahun 2013

John Lawler, (2003-2004) 'The Bali bombing: Australian law enforcement assistance to Indonesia', The Police Chief, August 2004; AFP, Annual report.

ANAO Audit Report No.30 2011-12 Fighting Terrorism at its Source, Australian Federal Police.

Indonesia, Undang-Undang Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, Tahun 2003

Pembukaan UUD 1945 Negara Kesatuan Republik Indonesia

Australia's counter-terrorism laws, Australian Government, Attorney General Departeme

Australian Federal Police, The First Thirty Years 1979-2009

Australian Federal Police, Fighting Terrorism at its Source, Australian National Audit Office

Pidato Perdana Menteri Australia (pada saat itu), The Hon. Alexander Downer, MP, di Canberra, 7 Mei 2002 yang berjudul "Advancing the National Interest: Australia's Foreign Policy Challenge"

SKRIPSI :

Utari, Indri Utari (2004). "*Kerja Sama Antara Polri dan Polisi Australia dalam Penyelidikan Kasus Bom Bali 12 Oktober 2002*". Universitas Katolik Parahyangan, Bandung.

Eky Prasetyo (2008). "*Hubungan Indonesia Australia Di Bawah Pemerintahan Perdana Menteri Kevin Rudd*".

Romli Artasasmita (1998). "Kedudukan dan Peranan Kepolisian Sebagai Suatu Studi Perbandingan, Makalah, pada Seminar Kepolisian Negara R.I., Sespim Polri Lembang, Bandung.

SITUS :

History, 9/11 Attacks, <http://www.history.com/topics/9-11-attacks>

Interpol, Member of Interpol, <https://www.interpol.int/Member-countries/World>

Detik, "Wakapolri: Ada 4 Hambatan Kerjasama Kepolisian Internasional", <http://news.detik.com/berita/2741466/wakapolri-ada-4-hambatan-kerjasama-kepolisian-internasional>

United Nations and Overseas Policing Association of Australia. "Australia's role within international policing", <http://www.unopaa.org/index.php/about-us/83-about-us/78-australia-s-role-within-international-policing>

Lost lives remembered during 9/11 ceremony". The Online Rocket, September 12, 2008.
<http://media.www.theonlinerocket.com/media/storage/paper601/news/2008/09/12/news/lost-Lives.Remembered.During.911.Ceremony.3427598.shtml>.

The Editors of Encyclopædia Britannica, 2002 Bali Bombings, <https://www.britannica.com/event/2002-Bali-Bombings>, Encyclopedia Britannica

- Perjanjian Keamanan RI-Australia Berlaku, <http://m.inilah.com/read/detail/11069/perjanjian-keamanan-ri-australia-berlaku>
- BBC News, Bali death toll set at 202, <http://news.bbc.co.uk/2/hi/asia-pacific/2778923.stm>
- Park, Andrew, "Bali bombings: Full list of victims' names", SBS Australia, 2012, <http://www.sbs.com.au/news/article/2012/10/10/bali-bombings-full-list-victims-names>
- Terrorism Research. What Is Terrorism. <http://www.terrorism-research.com/>
- AFP, <https://www.afp.gov.au/>.
- Mohammad Mova Al' Afghani, "Kampanye Melawan Terorisme Telah Merusak Tatanan Hukum" <http://www.theceli.com>.
- Kemenlu, *Penandatanganan Perjanjian Kerangka Kerjasama Keamanan RI - Australia di Lombok*, <http://www.kemlu.go.id/id/berita/siaran-pers/Pages/Penandatanganan-Perjanjian-Kerangka-Kerjasama-Keamanan-RI---Australia-di-Lombok.aspx>
- Detik News, "Pusat Koordinasi Polisi RI-Australia Diresmikan", <https://news.detik.com/berita/d-171380/pusat-koordinasi-polisi-ri-australia-diresmikan-tahun-2004>
- POLRI. Visi dan Misi Polri. <http://www.polri.go.id/tentang-visimisi.php>